

MOBILISASI POLITIK ISLAM MODERAT DI INDONESIA***POLITICAL MOBILIZATION OF MODERATE ISLAM IN INDONESIA*****Zulkarnain¹**¹Politeknik Negeri Balikpapan, Jalan Soekarno-Hatta Km 8, Kota Balikpapan

*E-mail: zulkarnain@poltekba.ac.id

Diterima 06-10-2023	Diperbaiki 15-10-2023	Disetujui 16-10-2023
---------------------	-----------------------	----------------------

ABSTRAK

Kesadaran politik kaum muslimin sangat penting untuk dibangun dalam kehidupan negara demokrasi. Hal ini disebabkan Islam sebagai salah satu agama besar di dunia dan memiliki pemeluk mayoritas di Indonesia. selain itu, Islam juga memiliki kekuatan tersendiri dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Dalam perpolitikan umat Islam di Indonesia rentan terjadi konflik, hal tersebut disebabkan banyaknya kaum muslimin yang tidak melaksanakan Islam sebagai sebuah gerakan politik yang menjadikan perbedaan pilihan politik sebagai sebuah rahmat. Studi ini ingin memberikan gambaran umum dalam rangka memabangun kehidupan politik umat Islam toleran terhadap perbedaan pandangan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka (library research). Metode penelitian ini pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Hasil penelitian ini menggambarkan upaya-upaya kongkrit yang harus dilakukan dalam rangka membangun pemahaman politik Islam yang menghormati perbedaan sebagai sebuah keniscayaan dalam konteks Indonesia yang plruralistik. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa gerakan politik islam moderat sebuah gerakan secara besar dan terus menerus berupa mobilisasi politik yang harus dilakukan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan para pendidik muslim dalam rangka membangun kesadaran politik Islam yang moderat. Jika mobilisasi ini terus menerus dilakukan oleh para tokoh gama, tokoh masyarakat dan pendidik muslim tentu konflik agama berbungkus politik di Indonesia akan mudah diredam. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam memahami gerakan mobilisasi gerakan politik bersis islam di Indonesia.

Kata kunci: Mobilisasi, politik, islam, moderat

ABSTRACT

The political awareness of Muslims is very important to build in a democratic country. This is because Islam is one of the major religions in the world and has many adherents in Indonesia. Apart from that, Islam also has its own strength in the world of politics in Indonesia. In politics, Muslims in Indonesia are prone to conflict. This is because many Muslims do not implement Islam as a political movement, which makes differences in political choices a blessing. This study wants to provide a general overview to build a political life for Muslims that is tolerant of differences in political views. This research uses qualitative methods with a library research approach. This research method collects data by searching for sources and constructing them from various sources, such as books, journals, and existing research. The results of this research illustrate the concrete efforts that must be made to build an understanding of Islamic politics that respects differences as a necessity in the pluralistic context of Indonesia. This research also reveals that the moderate Islamic political movement is a large and continuous movement in the form of political mobilization that must be carried out by religious leaders, community leaders, and Muslim educators to build moderate Islamic political awareness. If this mobilization continues to be carried out by religious leaders, community leaders, and Muslim educators, of course religious conflicts wrapped in politics in Indonesia will be easily suppressed. This study can be used as a reference in understanding the mobilization of Islamic political movements in Indonesia.

Keywords: Mobilization, politics, Islam, moderate

PENDAHULUAN

Keberagaman dalam masyarakat terkait dengan bahasa, agama, etnisitas, dan sebagainya merupakan fakta kehidupan di era kontemporer ini yang tidak dapat kita ingkari. Kalaupun dalam suatu negara ada keseragaman dalam hal tertentu, pasti ada keberagaman dalam hal lainnya. Dalam konteks ini sangat sulit atau bahkan mustahil menemukan suatu negara yang homogen [1]. Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan keberagaman dalam kehidupan agama dan politik merupakan kebutuhan bagi setiap negara dalam rangka menjaga stabilitas politik suatu negara. Indonesia sebagai salah satu negara yang multikultur dalam kehidupan beragama memiliki keharusan menjaga keharmonisan warga negara yang berbeda dalam pilihan politik dan agama.

Multikulturalisme sebagai sebuah ideologi memiliki dimensi politik dan dimensi kebudayaan. Didalam-Nya, terdapat penghargaan atas keberagaman budaya mainstream sosial. Dalam pengertiannya politis multikulturalisme merupakan kebijakan terhadap perlindungan keberagaman latar belakang identitas kolektif (etnis, agama, ataupun ras) di dalam suatu negara bangsa [2], [3].

Masalah keberagaman agama yang dimiliki Indonesia bukanlah sesuatu yang baru, akan tetapi juga memiliki akar yang kuat dalam budaya dan hidup masyarakat Indonesia. Masalah keberagaman agama di Indonesia sesungguhnya bukan hanya tentang perbedaan agama, karena beragama di Indonesia sebagai negara anti sekularisme sehingga agama merupakan kegiatan yang lumrah dalam ranah publik.

Salah satu ranah publik yang sering dijadikan ladang dakwah oleh agama islam khususnya adalah ranah politik. Karena sesungguhnya agama Islam sebagai agama rahmat bagi setiap manusia harus memiliki peran dalam mensejahterakan umat manusia salah satunya dengan terjun dalam dunia perpolitikan. Dalam konteks ini kehadiran agama lain sebagai salah satu keniscayaan kehidupan beragama memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan politik baik secara positif maupun negative. Keberagaman merupakan salah satu kekuatan-kekuatan sosial politik di Indonesia.

Secara umum, hubungan anatar agama di Indonesia berjalan baik hampir di beberapa wilayah. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada beberapa masalah yang sering

muncul dalam hubungan agama dan politik identitas di Indonesia. Dalam hampir Sembilan belas tahun terakhir konflik agama berubah politik banyak terjadi lebih tepatnya pasca Reformasi tahun 1998. Kekerasan komunal ini melibatkan komunitas-komunitas beda agama dalam skala besar. Seperti kasus yang terjadi di sekita tahun 1998. Namun saat ini, ada beberapa wacana yang muncul akibat konflik politik berubah agama seperti islam tidak toleran, radikalisme politik, dan anti pemimpin non-muslim.

Ketegangan-ketegaan akhir-akhir ini dalam banyak kasus menimbulkan kekerasan secara fisik, bahkan ancaman pembunuhan bagi pemimpin non-muslim, dan mungkin yang paling tidak terlupakan oleh masyarakat Indonesia adalah kasus penolakan pemakaman jenazah seorang muslim disebabkan oleh perbedaan pilihan politik. Hal semacam ini sangat memprihatinkan kehidupan politik dan agama di Indonesia. Oleh sebab itu, gerakan pembangun warga negara yang moderat sangat dibutuhkan ditengah-tengah fanatisme politik identitas keagamaan di Indonesia.

Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Pada tahun 2010, penduduk Muslim di Indonesia berjumlah 205,1 juta jiwa atau 88,2% dari 232,5 juta total penduduk Indonesia [4]. Meskipun mayoritas penduduknya adalah Muslim, Indonesia bukan negara teokrasi. Indonesia bukan negara yang dibangun oleh kesamaan agama, tetapi oleh kemajemukan suku bangsa dan pluralitas agama yang terikat oleh ideologi Pancasila sebagai dasar negara [5]. Pengakuan terhadap pluralisme agama tentu akan mempengaruhi kehidupan politik di Indonesia.

Islam sebagai salah satu agama terbesar di Indonesia sesungguhnya memiliki posisi strategis dalam melakukan mobilisasi politik moderat dalam rangka membangun kesadaran akan keniscayaan sebuah perbedaan di Indonesia. Islam moderat menjadi sebuah gerakan yang efektif jika dilakukan oleh tiga komponen seperti tokoh agama, negara, tokoh masyarakat dan para pendidik muslim yang moderat. Berbicara mobilisasi politik Islam tentu organisasi Islam di Indonesia memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi dan membangun politik islam moderat di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mobilisasi politik islam moderat di Indoensia, sehingga penelitian ini bisa dijadikan sebagai khasanah

pengembangan ilmu pengetahuan tentang pergerakan politik kaum muslimin di Indonesia.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data studi kepustakaan yang bersumber dari buku dan jurnal yang memiliki keterkaitan dengan gagasan mobilisasi politik Islam moderat di Indonesia. Beberapa buku akan menjadi sumber utama dalam penelitian ini.

Studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. secara teoritis ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian Menurut Zed [6] Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dengan metode studi Pustaka ini disajikan dalam tabel 1 yang menunjukkan data sekunder yang dijakan sebagai acuan dalam diskusi penelitian ini.

Tabel 1. Hasil Penelitian

No	Judul	Jenis	Isi
1	Individuals and parties—changes in processes of political mobilization[7]	European Sociologic al Review	Mobilisasi politik
2	Islam: Doktrin dan Peradaban [8]	Buku	Gerekan politik islam
3	Religion and Modern Society, Citizenship, Secularisation and the State [9]	Buku	Gerakan politik agama di masyarakat sekuler
4	Identitas islam moderat dalam kebijakan luar negeri Indonesia [5].	Jurnal Global	Islam Moderat

5	Moderate Muslim: Mapping the Ideology of Mass Islamic Organizationsin Indonesia [10]	Journal of Islamic Studies and Culture	Islam moderat dan Gerakan politik silam
6	Tipologi Islam moderat dan puritan: pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl[11].	jurnal tasawuf dan pemikiran islam	Islam moderat

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti ini akan menjabarkan beberapa hal anatar lain .

Mobilias Politik

Indonesia sebagai negara demokrasi tentu tidak akan jauh dalam pergulatan politik warga negaranya, mobilisasi politik merupakan salah satu bagian peting dalam kehidupan warga negara dengan politik dan partai politik sebagai kendaraanya. Secara umum mobilisasi merupakan sebuah tindakan atau keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan dalam ranah politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, namun warga negara juga bisa menjadi oposisi yang mengawal dan memberikan kritik dan saran kepada rezim yang berkuasa[12].

Mobilisasi politik didefinisikan sebagai usaha aktor untuk mempengaruhi distribusi kekuasaan. Ada 2 model dalam mobilisasi. Pertama, mobilisasi vertical, yakni mobilisasi yang bekerja dalam hubungan *vertical*. Mobilisasi *vertical* meliputi *Down mobilization model*, *grass-root or populist mobilization model*, dan *ideal democratic model*. Kedua, mobilisasi horizontal, yakni menyertakan segala kemungkinan dari proses-proses internal dalam mobilisasi yang berlangsung diantara Partai dan Individu. Model-model ini membantu untuk menganalisis keadaan politik saat ini sebagaimana ditandai oleh kesinambungan proses mobilisasi horisontal dan vertical [7].

Mobilisasi Politik bukan sekedar sebagai proses dimana warga Negara diarahkan pada keterlibatan politik. Definisi tersebut dianggap masih umum dan mungkin dilihat sebagai kelebihan ataupun kekurangan sebuah “pendapat umum” dari konsep-konsep

di masa lalu mengenai terminology mobilisasi politik. Bagaimanapun, pendefinisian secara umum ini bukan berarti bahwa konsep tersebut bisa digunakan untuk melihat konteks politik. Mobilisasi memiliki banyak makna. Mobilisasi dapat diartikan sedikitnya dalam tiga gejala sosial yang berbeda. Pertama, dalam aspek sosial ekonomi, Kedua, Mobilisasi dapat berarti usaha pembersihan oleh rejim totaliter sebagaimana. Ketiga, “Mobilisasi” dapat juga mengacu pada proses untuk melibatkan warganegara di dalam politik [13].

Model mobilisasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mobilisasi dalam makna ketiga dimana mobilisasi dilakukan dalam rangka membangun kesadaran warga negara untuk berpartisipasi dalam politik. Terlepas dari tiga makna tersebut dalam proses percaturan politik melahirkan banyak masalah yang sangat kompleks yang sering mewarnai kehidupan politik warga negara salah satunya adalah konflik agama yang berujung politik dan sebaliknya [12].

Mobilisasi politik yang dilakukan oleh partai politik baik partai berbasis agama maupun nasionalis memberikan dampak besar pada konflik yang berbau SARA (suku, ras, agama dan antar golongan) dalam kontekstasi politik Indonesia isu ini bukanlah suatu yang aneh bahkan isu ini merupakan cerita lama yang tidak pernah usung terjadi disetiap pemilihan umum baik di pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu, penelitian ini berinisiatif untuk melakukan sebuah mobilisasi politik dalam rangka membangun politik yang moderat melalui para tokoh agama, tokoh masyarakat dan para pendidik.

Islam sebagai agama mayoritas ternyata bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan bahkan kita juga tidak bisa menutup mata bahwa konflik politik banyak terjadi di negeri ini akibat sentimen dan manatisme keagamaan. Islam sebagai agama rahmat seluruh manusia memiliki posisi strategis dalam konteks Indonesia, secara kuantitatif muslim menjadi kekuatan politik yang besar sehingga ummat muslim memiliki kemampuan dalam membangun umat muslim yang moderat dalam kehidupan politik, namun, akan menjadi api dalam sekam jika tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, mobilisasi politik Islam moderat sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga keharmonisan warga negara Indonesia yang multikultural khususnya keberagaman pilihan politik dan agama. Dalam penelitian ini menekankan tiga ranah yang memiliki posisi

strategis dalam membangun politik Islam moderat yakni tokoh agama Islam, Tokoh masyarakat, dan para pendidik muslim.

Islam Moderat

Islam moderat dalam penelitian ini akan menggunakan pemikiran Khaled Abou El-Fadl. Khaled merupakan salah satu tokoh Islam yang aktif menyuarakan Islam moderat dan sangat menentang paham-paham yang “fundamentalis, fanatik, ekstremis, radikal atau ia istilahkan dengan nama “puritan” [11]. Abou Fadl dilahirkan di Kuwait pada tahun 1963, kemudian tumbuh berkembang untuk menghabiskan masa kanak-kanaknya hingga remaja di Kuwait dan Mesir. Ayahnya, Medhat Abou Fadl, adalah seorang ahli hukum Islam, yang menjadi guru pertamanya untuk melawan segala bentuk penindasan, dan ibunya, Afaf Nimr, yang setiap pagi membangunkannya dengan melantunkan ayat-ayat *Al-Qur'an* [11]

Menurutnya Fadl istilah Islam moderat menemukan akarnya lewat ‘preseden *Al-Qur'an* yang selalu memerintahkan umat Islam untuk menjadi orang yang moderat, dan preseden *Al-Sunnah* yang menggambarkan sosok nabi yang menunjukkan tipikal orang moderat, tatkala dihadapkan pada dua pilihan ekstrem, maka Nabi selalu memilih jalan tengah. Kata moderat tidak lepas dari makna dasar fundamentalis yang dalam bahasa Arab dikenal dengan kata *usuli*, yang memiliki makna pokok dan mendasar. Fundamentalisme Islam ada kesamaannya dengan fundamentalisme Kristen; yakni kembali kepada fundamentalis agama secara penuh dan literal bebas dari kompromi, penjinakan dan reinterpretasi. Hal Ini, berdampak pada kesan bahwa hanya fundamentalis Islam yang berlandaskan pada pokok dan dasar Islam, yakni *al-Qur'an* dan Hadīts.

Menurut Abou Fadl, setiap Muslim dalam kadar tertentu adalah orang yang meyakini nilai-nilai fundamental. Dengan kata lain, komunitas moderat juga mendeskripsikan diri mereka sebagai *usuli* yang tentunya dengan semangat perspektif yang berbeda dengan kelompok puritan. Adapun secara teoretis, istilah puritan menurutnya, menunjuk pada keyakinan absolutisme yang tidak kenal kompromi, dan dalam banyak hal otoritasnya cenderung *puris*, yakni tidak toleran terhadap berbagai sudut pandang yang berkompetisi dan memandang realitas plural sebagai bentuk kontaminasi atas kebenaran yang sesungguhnya [11]. Fadl [14] melakukan kateogisasi menjadi dua disebabkan oleh

pemahaman umum kaum muslimin kebanyakan jatuh pada pilihan di antara dua kutub ekstrem, yakni moderat dan puritan.

Dalam konteks sendikiawan muslim Indonesia sering membahasa tentang hal ini salah satunya adalah Nurcholis Madjid. Nurcholis Madjid salah satu cendikiawan muslim yang selalu tampil terdepan untuk mengatakan, komunitas puritan menyebarkan paham keagamaan yang telah standard (baku) dalam suatu agama tertentu, dan juga menyebarkan gagasan-gagasan yang palsu dan bersifat menipu. Pada era kontemporer ini puritanisme telah menjadi sumber kekacauan dan penyakit mental dalam Masyarakat [8].

Berbeda dengan Islam moderat, Islam puritan memperlakukan Islam secara kaku dan tidak dinamis. Mereka sangat membesarbesarkan peran teks dan memperkecil peran aktif manusia dalam menafsirkan teks keagamaan. Dalam hal ini orientasi Islam puritan mendasarkan diri dibalik kepastian makna teks, sehingga implementasi perintah Tuhan, yang seutuhnya dan secara menyeluruh seakan sudah termaktub di dalam teks, bukan pada nuansa kontekstualisasi [14].

Islam dengan semangat moderat menggunakan prinsip-prinsip sistematis berupa kritik sejarah terhadap *Hadīts-Hadīts* yang dinisbatkan pada Nabi. Karena suatu kenyataan bahwa *Hadīts* terkodifikasi dan terpelihara satu abad sepeninggal Nabi, adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari akan cerminan lingkungan historis, perselisihan sektarian, dan konflik politik. Menghadapi situasi yang demikian, Islam moderat menggunakan metode analisis kritis dengan meneliti kondisi-kondisi lingkungan yang melingkupi. Tujuannya untuk menyakinkan bahwa setiap riwayat yang ada dapat dipahami dengan baik secara historis maupun rasional. Hal ini sangat kontradiktif pada ilsm puritan yang seakan tidak menemukan titik temu, Islam puritan menganggap *Hadīts* Nabi selayaknya al-Qur'ân yang mutlak, sebagai kode hukum yang harus diterapkan tanpa ada dipertanyakan, hal ini dikarenakan di dalam kepercayaan mereka semua persoalan hidup sudah terjelaskan dalam sumber hukum tersebut secara spesifik, detail dan gambling [8].

Berdasarkan hal tersebut maka kita dapat menarik garis merah tentang makna Islam moderat, dimana Islam moderat merupakan gerakan Islam yang mengedepankan kontekstualisasi sekaligus memperhatikan aspek tujuan moral dan etis,

berkeyakinan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan fleksibel dalam merespons perubahan zaman yang semakin kompleks. Lain halnya dengan Islam puritan lebih mengedepankan kekuatan teks sehingga terkesan kaku dalam menerapkan hukum. Pembangun Islam moderat tentu sangat dibutuhkan dalam kontestasi politik Indonesia yang sangat rentan terjadi konflik agama akibat percaturan politik di tanah air.

Perbedaan pilihan politik tidak sedikit mengakibatkan konflik berkepajangan dalam kehidupan demokrasi warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, Islam moderat merupakan salah satu solusi yang ingin ditawarkan dalam membangun kehidupan peprpolitikan yang toleran melalui pembentukan agen-agen Islam moderat baik dari masyarakat maupun dalam konteks pendidikan politik di Idonesia.

Politik Islam Moderat

Tidak ada agama yang diwahyukan oleh Tuhan tanpa dikelilingi oleh berbagai budaya, artinya agama yang diturunkan oleh tuhan sudah terdapat budaya lama dimana wahyu agama itu diturunkan. Agama sebagai sebuah bentuk ekspresi sosial masyarakat manusia pasti berubah dengan perubahan besar dalam Masyarakat [9], [15]. Islam adalah agama yang pada awalnya diwahyukan dalam masyarakat yang tidak beradab. Pada dasarnya Islam itu netral. Ajarannya didasarkan pada Kitab Suci. Secara normatif, tidak ada perbedaan dalam ajaran agama apapun, akan tetapi interpretasi manusia terhadap ajarannya menyebabkan berbagai pemahaman dan sikap manusia [10]. Bahkan dalam Islam sendiri terjadi perdebatan panjang dalam penafsiran wahyu tersebut hingga saat ini.

Bertahnya Islam moderat di Indonesia tidak bisa dipungkiri disebabkan oleh dominasi pemikiran moderat bertahan di Indonesia dan mampu menyesuaikan diri dengan budaya. Hal ini berbeda dengan religiusitas radikal yang biasanya konfrontatif dan tegas dalam menghadapi tradisi baru. Selain itu, Islam moderat menempati posisi strategis di pemerintahan, baik organisasi formal atau organisasi keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (Majelis Ulama Indonesia) [10]. Pendidikan formal dan non formal juga memiliki peran yang sama dalam membangun kesadaran politik Islam moderat di Indonesia. Koperasi yang intens ini menjadi media untuk memperkuat kedua posisi pemerintahan dan komunitas Islam moderat. Selain aspek tersebut, ada beberapa aspek yang menjadi

agen penting dalam membangun dan mempertahankan Islam moderat di Indonesia seperti peran tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Pendidikan formal merupakan salah satu wadah penting dalam memberikan pendidikan politik bagi umat Islam sejak dini hingga perguruan tinggi. Guru dan dosen sebagai agen dalam membentuk watak dan karakter penerus bangsa yang moderat melalui pendidikan yang berlandaskan pada kemanusiaan dan pendidikan multikulturalisme [16].

Indonesia sebagai negara demokrasi yang pluralistik mengharuskan para guru membangun kesadaran politik warga negara muda untuk memahami dan menyadari keberagaman dalam berbagai kehidupan bangsa Indonesia termasuk keberagaman pilihan politik dan agama, hal tersebut berangkat dari ciri-ciri budaya demokrasi yang menghargai nilai-nilai egalitarian; pluralisme, keterbukaan, dialogis, persuasif, dan distribusi kekuasaan [16]. Oleh sebab itu, pendidikan yang mengedepankan semangat pluralisme dan dialogis dalam kehidupan politik sangat penting untuk terus dibangun oleh para pendidik Muslim agar Islam moderat di Indonesia akan terus terjaga dan memiliki dampak positif terhadap pembangunan semangat politik Islam moderat. Jika mobilisasi politik moderat dilakukan secara terus menerus diberbagai jenjang pendidikan oleh para pendidik Muslim tentu semangat keberagaman dalam pilihan politik akan terbangun dengan kokoh dalam benak umat Muslim.

Mobilisasi politik moderat tidak bisa hanya mengandalkan partai politik dan pendidikan semata, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sangatlah dibutuhkan. Tokoh agama dalam Islam Indonesia disebut Kiai. Kiai adalah istilah budaya (bermula dari Jawa). Orang Jawa biasa menyebut kiai siapa atau apa saja yang mereka puja dan mereka hormati.

Bagi orang Jawa orang yang disebut kiai semula adalah mereka yang dipuja dan dihormati masyarakat karena ilmunya, juga jasa dan rasa kasih sayang mereka kepada Masyarakat [17], [18]. Di masyarakat kontemporer persona kiai tidak begitu saja hilang, kiai menduduki peran top leader dengan memiliki kekuatan yang besar dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini, karena secara tradisi masyarakat mengaitkan dirinya dengan etos spiritual atau mistik, di mana setiap aspek kehidupan orang Jawa senantiasa

memiliki makna batin/raja yang bersifat spiritual [19].

Kehidupan negara modern saat ini kekuatan kiai dalam melakukan perubahan dalam masyarakat. Kiai di era kontemporer bukan hanya sekedar pengajar ngaji (membaca Al-Qur'an dan mengajarkan agama kepada para santri) tetapi peran kiai menjangkau ranah kehidupan politik masyarakat, bahkan setuju atau tidak kiai memiliki peran penting dalam arah politik masyarakat. Jika kekuatan ini bisa dilakukan dengan membangun semangat politik Islam moderat tentu hal ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan paradigma jamaahnya (umat Muslim) tentang politik Islam yang moderat. Jika wacana politik Islam moderat terus produksi dan reproduksi oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat tentu umat akan mobilisasi dalam rangka membangun Muslim yang menghargai pilihan politik setiap warga negara tanpa harus menimbulkan konflik baik secara simbolik lebih-lebih secara fisik.

KESIMPULAN

Mobilisasi politik Islam moderat merupakan fenomena politik kontemporer yang menunjukkan kekuatan politik di luar mobilisasi yang dilakukan oleh partai politik dan gerakan politik Islam radikal. Mobilisasi politik Islam moderat sekarang menjadi kekuatan politik baru dalam kancah perpolitikan Indonesia. Gerakan politik ini juga menunjukkan bahwa Islam sebagai gerakan politik memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan politik di Indonesia. Eksistensi Islam semakin memperkuat posisi Islam moderat dalam sejarah dan masa depan politik Islam di Indonesia yang digerakkan oleh Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pendidik Muslim Tentu Konflik Agama Berbungkus Politik Di Indonesia Akan Mudah Diredam.

SARAN

Penelitian mobilisasi politik Islam moderat harus terus dilakukan untuk menganalisis berbagai fenomena politik, oleh sebab itu penelitian dalam metode kuantitatif sangat direkomendasikan dalam penelitian masa depan untuk memperkuat penelitian kualitatif yang telah banyak dilakukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian (P3M) Politeknik Negeri Balikpapan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. A. Banks, "Citizenship Education and Diversity: Implications for Teacher Education," *J. Teach. Educ.*, vol. 52, no. 1, 2001, doi: 10.1177/0022487101052001002.
- [2] Arie setyaningrum, "Multikulturalisme Sebagai Identitas Kolektif," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada*, vol. 7, nomor 2. 2003.
- [3] R. Beiner, "Theorizing citizenship," *SUNY series in political theory. Contemporary issues*. pp. ix, 335 p., 1995.
- [4] H. Kettani, "Muslim Population in Europe: 1950 – 2020," *Int. J. Environ. Sci. Dev.*, pp. 154–164, 2010, doi: 10.7763/IJESD.2010.V1.29.
- [5] L. Andriasanti, "Identitas Islam Moderat dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia," *Glob. J. Polit. Int.*, vol. 16, no. 1, pp. 84–101, May 2015, doi: 10.7454/global.v16i1.7.
- [6] Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan / pengarang, Mestika Zed*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004.
- [7] B. Nedelmann, "Individuals and parties—changes in processes of political mobilization," *Eur. Sociol. Rev.*, vol. 3, no. 3, pp. 181–202, Dec. 1987, doi: 10.1093/oxfordjournals.esr.a.036449.
- [8] Nurcholis Madjid, *Islam doktrin dan peradaban : sebuah telaah kritis tentang masalah keimanan, kemanusiaan, dan kemodernan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadani, 1992.
- [9] S. MacLean, "Book Review: Religion and Modern Society: Citizenship, Secularisation and the State," <http://dx.doi.org/10.1177/0008429815570517k>, vol. 44, no. 1, pp. 124–126, Feb. 2015, doi: 10.1177/0008429815570517K.
- [10] S. Sirait, "Moderate Muslim: Mapping the Ideology of Mass Islamic Organizations in Indonesia," *J. Islam. Stud. Cult.*, vol. 4, no. 1, 2016, doi: 10.15640/JISC.V4N1A14.
- [11] C. Wahyudi and F. Ushuluddin Sekolah Tinggi Agama, "Tipologi Islam Moderat dan Puritan: Pemikiran Khaled M. Abou el-Fadl," *Teosof. J. Tasawuf dan Pemikir. Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 75–92, Jun. 2011, doi: 10.15642/TEOSOFI.2011.1.1.75-92.
- [12] J. M. Hansen, "Mobilization, participation, and political change," <http://dx.doi.org/10.1177/1354068815605677>, vol. 22, no. 2, pp. 149–157, Sep. 2015, doi: 10.1177/1354068815605677.
- [13] G. TOWAR, "Peran Partai Politik dalam Mobilisasi Pemilu," Universitas Diponegoro, 2009.
- [14] Fadl, *Selamatkan Islam dari muslim puritan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- [15] B. S. Turner, "Managing religions, citizenship and the liberal paradox," *Citizensh. Stud.*, vol. 16, no. 8, pp. 1059–1072, 2012, doi: 10.1080/13621025.2012.735029.
- [16] S. Suharno, "Telaah kritis terhadap masyarakat madani (civil society)," *J. Civ. Media Kaji. Kewarganegaraan*, vol. 4, no. 2, Dec. 2007, doi: 10.21831/CIVICS.V4I2.6033.
- [17] M. Mawardi, "Public Perception on the Role of Kiai in Yogyakarta," *Analisa*, vol. 20, no. 2, p. 133, 2013, doi: 10.18784/analisa.v20i2.171.
- [18] R. Adawiyah, "Kiai Langgar Sebagai Episentrum Pendidikan Islam," *Tarbiyatuna J. Pendidik. Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 1–23, 2016.
- [19] F. Barokah, "Mistisisme Politik : Eksistensi Magis dalam Perpolitikan

Indonesia,” *JiIP J. Ilm. Ilmu
Pemerintah.*, vol. 8, no. 1, pp. 1–19,
2023, doi: 10.14710/jiip.v8i1.13275.